

PENERAPAN INTERACTIVE PLANNING DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DI KABUPATEN SIDOARJO

Nur Cholifah

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email: nurcholifah7301@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 6 Bulan : Juni Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<i>This study aims to analyze the implementation of interactive planning in community empowerment programs to achieve independent village status in Sidoarjo Regency, with a specific focus on Tulangan Village. The interactive planning approach emphasizes active community involvement in all stages of development planning, including problem identification, program formulation, and evaluation. The research uses a qualitative descriptive method with data collected through interviews, observation, and documentation. The findings indicate that the implementation of interactive planning is not yet fully optimized due to challenges such as low community participation, weak stakeholder coordination, and limited understanding of the strategic plans outlined in the 2021–2026 Strategic Plan (Renstra) of the Department of Community and Village Empowerment (DPMD) of Sidoarjo Regency. Nevertheless, there is a positive indication that community involvement in planning processes can enhance a sense of ownership and strengthen the effectiveness of empowerment programs. Therefore, a consistent and structured implementation of interactive planning can serve as an effective strategy to accelerate the achievement of independent village status in Sidoarjo Regency.</i> Keywords : <i>interactive planning, community empowerment, independent village, participation, village development.</i>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan interactive planning dalam program pemberdayaan masyarakat sebagai upaya strategis untuk mempercepat pencapaian status desa mandiri di Kabupaten Sidoarjo. Fokus utama penelitian adalah bagaimana masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan tujuan (*ends planning*), strategi pelaksanaan (*means planning*), hingga pengelolaan sumber daya (*resource planning*). Penelitian dilakukan di Desa Tulangan yang menjadi representasi desa maju yang belum mencapai status mandiri, meskipun telah menerima berbagai program dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi interactive planning masih menghadapi tantangan

berupa lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, rendahnya kapasitas kelembagaan desa, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Namun demikian, pendekatan ini memberikan potensi signifikan dalam menciptakan perencanaan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan lokal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi perencanaan di tingkat desa, penguatan sinergi antar lembaga, serta pelibatan masyarakat secara menyeluruh sebagai strategi kunci dalam mewujudkan desa mandiri yang berkelanjutan.

Kata Kunci : *Interactive Planning, Pemberdayaan Masyarakat, Desa Mandiri, Partisipasi, Pembangunan Desa.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks Indonesia, keberadaan desa memiliki posisi strategis sebagai fondasi pembangunan yang berbasis pada kearifan lokal, partisipasi masyarakat, serta potensi wilayah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit menegaskan pentingnya peran desa sebagai subjek pembangunan, yang mendorong terciptanya desa mandiri melalui proses yang partisipatif dan berkelanjutan.

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur memiliki 322 desa yang tersebar di 18 kecamatan. Meskipun sebagian desa telah mencapai status mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), masih terdapat sejumlah desa yang tergolong sebagai desa berkembang atau maju, namun belum memenuhi indikator kemandirian secara utuh. Salah satu contohnya adalah Desa Tulangan yang memiliki potensi sumber daya cukup besar, namun belum berhasil mencapai status desa mandiri. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang seharusnya menjadi ujung tombak pembangunan desa.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sosial, ekonomi, dan kelembagaan warga desa agar mampu mengelola pembangunan secara mandiri. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak program pemberdayaan yang disusun secara top-down dan kurang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan. Lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan serta kurangnya inovasi lokal menjadi penghambat dalam pencapaian kemandirian desa.

Sebagai alternatif pendekatan yang lebih partisipatif dan strategis, konsep *interactive planning* diperkenalkan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan desa. Menurut Ackoff

(1981), *interactive planning* merupakan bentuk perencanaan yang bersifat partisipatif, adaptif, dan kolaboratif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga aktor utama dalam pembangunan. Pendekatan ini relevan untuk menjawab tantangan di lapangan karena memungkinkan terciptanya sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga terkait dalam menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan riil warga.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Renstra DPMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021–2026 juga telah menekankan pentingnya pelibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan desa. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara perencanaan di tingkat kabupaten dengan implementasi di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana *interactive planning* telah diterapkan dalam program pemberdayaan masyarakat, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas pendekatan ini dalam upaya mewujudkan desa mandiri.

Penelitian ini berfokus pada penerapan *interactive planning* dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik perencanaan partisipatif serta hambatan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam percepatan pencapaian status desa mandiri di wilayah tersebut.

B. KAJIAN TEORI

Teori Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan merupakan suatu pendekatan dalam ilmu administrasi negara yang berfungsi sebagai sarana strategis dalam mengelola kebijakan pembangunan, khususnya di negara berkembang. Menurut *Hidayat et al.* (2022), administrasi pembangunan adalah suatu upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah dalam merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, yang pada dasarnya mencakup perubahan sosial, ekonomi, dan kelembagaan secara terencana dan bertahap.

Administrasi pembangunan tidak hanya menekankan pada efektivitas birokrasi, tetapi juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Tjokroamidjojo, (1998) yang menyatakan bahwa administrasi pembangunan yang baik harus didasarkan pada prinsip-

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Teori Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses sistematis yang dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu melalui pengalokasian sumber daya secara efektif dan efisien. Menurut C. Brobowski (1964), perencanaan adalah himpunan keputusan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu untuk mempengaruhi perekonomian suatu negara. Melville J. Branch (1974) mendefinisikan perencanaan sebagai aktivitas berkelanjutan untuk memutuskan apa yang dapat dan diinginkan untuk masa depan serta bagaimana mencapainya. Peter Hall (1992) menekankan bahwa perencanaan adalah penyusunan rangkaian tindakan yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu. Sementara itu, Conyers dan Hills (1994) menyatakan bahwa perencanaan adalah proses berkesinambungan yang mencakup pengambilan keputusan untuk memilih berbagai alternatif penggunaan sumber daya guna mencapai tujuan tertentu pada masa depan.

Dalam konteks pembangunan daerah, perencanaan pembangunan berfungsi untuk memperbaiki penggunaan berbagai sumber daya publik yang tersedia dan meningkatkan kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya secara bertanggung jawab (Kuncoro, 2004). Perencanaan pembangunan daerah harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, ekonomi, keamanan, kondisi fisik, segi pembiayaan, serta kualitas sumber daya yang ada di wilayah tersebut (Widodo, 2006).

Interactive planning

Perencanaan interaktif (*interactive planning*) merupakan pendekatan perencanaan yang menempatkan masyarakat sebagai faktor utama dalam setiap tahap proses perencanaan pembangunan. Menurut Ackoff (1981), perencanaan interaktif berfokus pada pembuatan masa depan yang lebih baik dengan menghubungkan kondisi masa kini dengan potensi dan kebutuhan masa depan melalui keterlibatan aktif berbagai pihak. Pendekatan ini berusaha mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, merumuskan solusi yang relevan, serta melibatkan masyarakat dalam implementasi dan evaluasi program pembangunan.

Penerapan perencanaan interaktif dapat meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan yang mengutamakan partisipasi aktif dari masyarakat dalam merancang dan menjalankan program pembangunan, seperti yang diatur dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Renstra PMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024. Dengan adanya perencanaan

interaktif, diharapkan masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses perencanaan dan pengelolaan program-program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa, seperti yang ditargetkan dalam Renstra PMD Kabupaten Sidoarjo.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan terhadap suatu kegiatan atau program pembangunan. Cohen dan Uphoff (1977) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat dalam empat tahapan kegiatan pembangunan, yaitu: pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pemanfaatan hasil, dan evaluasi.

Menurut Ritonga, (2020) dalam penelitiannya terhadap desa-desa di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa desa yang menerapkan pendekatan partisipatif dalam program pemberdayaan cenderung memiliki indeks pembangunan desa yang lebih tinggi dan lebih cepat mencapai status desa mandiri.

Menurut Rofiq et al., (2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang tinggi dalam musyawarah desa dan program pemberdayaan memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, studi oleh Yuliani (2020) juga membuktikan bahwa keberhasilan suatu desa dalam mencapai status desa mandiri sangat dipengaruhi oleh tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis potensi lokal. Oleh karena itu, dalam *interactive planning*, partisipasi masyarakat merupakan strategi integral yang dapat mempercepat transformasi.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dalam konteks nyata, khususnya tentang bagaimana perencanaan interaktif (*interactive planning*) diterapkan dalam proses pemberdayaan masyarakat di Desa Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan kondisi sosial yang kompleks dan dinamis, serta menangkap makna, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap proses pembangunan desa.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menggali informasi yang mendalam mengenai keterlibatan masyarakat, pemerintah desa, serta instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam proses perencanaan pembangunan. Penelitian ini tidak berusaha mengukur hubungan antar variabel secara statistik, melainkan memahami secara kontekstual bagaimana *interactive planning* bekerja dalam praktik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Desa Tulangan dipilih sebagai lokasi studi karena memiliki karakteristik penting: meskipun memiliki potensi sumber daya manusia dan alam yang cukup baik, desa ini belum mencapai status desa mandiri. Hal ini menjadikan Desa Tulangan sebagai subjek yang tepat untuk mengkaji permasalahan implementasi perencanaan partisipatif dan strategi pemberdayaan masyarakat yang ada.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap berbagai pemangku kepentingan, antara lain kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, perwakilan dari DPMD Kabupaten Sidoarjo, serta masyarakat umum yang terlibat dalam program pemberdayaan. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung aktivitas dan interaksi yang terjadi selama proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yakni peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan namun tetap terbuka terhadap pengembangan dan eksplorasi topik berdasarkan respons informan. Teknik ini memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang lebih kaya dan mendalam karena adanya interaksi yang fleksibel antara peneliti dan informan.

Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan desa, seperti musyawarah desa, forum konsultasi publik, dan pertemuan antara masyarakat dan pemerintah desa. Observasi ini bertujuan untuk memahami pola komunikasi, partisipasi, serta dinamika relasi antaraktor yang terlibat dalam proses perencanaan. Peneliti mencatat berbagai aktivitas dan interaksi yang terjadi, termasuk hambatan dan potensi yang muncul di lapangan.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti Rencana Strategis (Renstra) DPMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021–2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), laporan Indeks Desa Membangun (IDM), dan laporan evaluasi program pembangunan desa. Data ini digunakan untuk memahami konteks kebijakan, target pembangunan, serta sebagai bahan pembandingan terhadap hasil temuan lapangan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1994), yang terdiri atas tiga tahap: (1) reduksi data, yaitu proses seleksi, penyederhanaan, dan transformasi data mentah ke dalam bentuk yang lebih fokus; (2) penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan grafik; serta (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses mencari pola, keterkaitan, dan makna dari data yang diperoleh.

Analisis ini dilakukan secara terus-menerus dan bersifat siklikal selama proses penelitian berlangsung.

Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, peneliti melakukan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan, data observasi, dan dokumen tertulis. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan hasil wawancara kepada narasumber (member check) untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan maksud informan. Kredibilitas juga diperkuat dengan keterlibatan peneliti secara langsung dan intensif di lapangan.

Penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk menggambarkan implementasi *interactive planning*, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana pendekatan ini efektif dalam mendorong desa menuju status mandiri. Oleh karena itu, aspek-aspek seperti idealized design, formulation of the mess, ends planning, means planning, dan resource planning yang merupakan komponen utama dari teori *interactive planning* oleh Russell Ackoff, menjadi alat analisis utama dalam memahami dinamika perencanaan pembangunan desa.

Secara keseluruhan, metode penelitian ini dirancang untuk menangkap kompleksitas dari praktik perencanaan partisipatif di tingkat desa dan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dalam upaya penguatan kemandirian desa. Dengan pendekatan kualitatif ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan relevan bagi para pembuat kebijakan, praktisi pembangunan desa, serta akademisi yang tertarik dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan perencanaan pembangunan partisipatif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, yang merupakan salah satu desa dengan status belum mandiri menurut Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024. Meskipun memiliki potensi sumber daya manusia dan alam yang cukup tinggi, desa ini belum mampu mencapai indikator kemandirian karena lemahnya kapasitas kelembagaan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan ketidaksesuaian antara program pemberdayaan dengan kebutuhan lokal. Hal ini menjadi dasar untuk menganalisis sejauh mana pendekatan *interactive planning* telah diterapkan dalam perencanaan pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta masyarakat setempat, ditemukan bahwa pemahaman tentang *interactive planning* masih sangat terbatas. Dalam praktiknya, musyawarah desa (Musdes) yang seharusnya menjadi forum utama partisipasi masyarakat, sering kali hanya melibatkan tokoh tertentu dan belum menjangkau

kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan kelompok difabel. Akibatnya, aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat tidak sepenuhnya terakomodasi dalam rencana pembangunan desa.

Pada tahap *formulation of the mess*, ditemukan sejumlah permasalahan struktural yang belum terselesaikan, seperti belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), rendahnya literasi masyarakat terhadap regulasi pembangunan, dan keterbatasan pendampingan dari pihak eksternal. Selain itu, sinkronisasi antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo dan Renstra DPMD belum terimplementasi secara merata di tingkat desa. Hal ini menyebabkan banyak program bersifat top-down dan tidak selaras dengan potensi lokal yang dimiliki desa.

Dalam aspek *ends planning*, tujuan pembangunan desa sering kali tidak dirumuskan berdasarkan kondisi ideal desa ke depan. Pemerintah desa lebih fokus pada pelaksanaan program tahunan daripada menyusun visi jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan seperti peningkatan indeks sosial, ekonomi, dan ekologi desa belum dijabarkan dalam indikator operasional yang jelas, sehingga penyusunan rencana kerja cenderung normatif dan kurang berbasis data.

Tahap *means planning* menunjukkan adanya ketimpangan antara strategi dan pelaksanaan. Program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan dan pengembangan ekonomi desa sering kali dilakukan tanpa analisis kebutuhan yang mendalam. Misalnya, pelatihan pengolahan hasil pertanian dilakukan di wilayah yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan program belum berbasis kebutuhan nyata masyarakat, melainkan hanya mengikuti pola program dari atas.

Pada tahap *resource planning*, ditemukan ketidakefisienan dalam pemanfaatan anggaran pemberdayaan. Dari total Rp 10 miliar anggaran DPMD tahun 2024, belum ada indikator kinerja yang mengukur efektivitas penggunaan dana terhadap peningkatan status desa. Selain itu, laporan keuangan masih berfokus pada realisasi anggaran, bukan pada dampak atau output program terhadap kemandirian desa. Kurangnya integrasi data pembangunan juga menjadi penghambat dalam pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based planning*).

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih bersifat formalitas. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam forum Musrenbangdes serta dominasi elite lokal dalam proses pengambilan keputusan. Padahal, dalam konsep *interactive planning*, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam semua tahap proses perencanaan.

Koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk antara desa, kecamatan, dan DPMD Kabupaten, juga masih belum optimal. Banyak kebijakan yang tidak dikawal secara

berkelanjutan, dan tidak adanya mekanisme evaluasi partisipatif menyebabkan keberlanjutan program menjadi lemah. Minimnya dialog antar-lembaga dan belum adanya sistem monitoring bersama menjadi tantangan tersendiri dalam menerapkan perencanaan interaktif secara konsisten. Namun demikian, terdapat beberapa praktik baik yang mulai berkembang, seperti inisiatif pemuda desa dalam membentuk kelompok sadar wisata berbasis budaya lokal, serta pelibatan perempuan dalam pengelolaan bank sampah. Praktik-praktik ini muncul dari inisiatif lokal yang tidak tercantum dalam dokumen perencanaan resmi, namun menunjukkan bahwa jika diberikan ruang dan dukungan, masyarakat mampu menghasilkan solusi kreatif dan berkelanjutan.

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *interactive planning* di Desa Tulangan masih pada tahap awal dan belum terlembaga secara penuh. Diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa, peningkatan literasi perencanaan masyarakat, dan restrukturisasi mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan agar *interactive planning* benar-benar menjadi strategi utama dalam pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri. Konsistensi implementasi, dukungan kebijakan, dan evaluasi partisipatif menjadi kunci keberhasilan perencanaan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan *interactive planning* dalam program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di Desa Tulangan, masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Meskipun telah terdapat kerangka regulasi dan perencanaan strategis dari DPMD, implementasinya di tingkat desa belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip perencanaan partisipatif.

Interaktivitas dalam perencanaan masih perlu ditingkatkan. Mekanisme musyawarah desa (Musdes) yang seharusnya menjadi forum dialog antara masyarakat dan pemerintah desa belum berjalan secara substansial, sering kali hanya formalitas.

Meskipun demikian, terdapat potensi besar dalam penerapan *interactive planning* di Sidoarjo, karena terdapat indikasi meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran aktif dalam pembangunan. Hal ini tercermin dari inisiatif warga dalam beberapa program seperti pengelolaan lingkungan dan kegiatan ekonomi berbasis komunitas.

Penelitian ini juga menemukan bahwa sinergi antar aktor seperti DPMD, Bappeda, pemerintah desa, dan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Ketidaksinkronan data dan

minimnya evaluasi lintas sektor menyebabkan beberapa program pemberdayaan berjalan secara parsial dan tidak berkelanjutan.

Keberhasilan penerapan *interactive planning* sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia, baik dari sisi aparatur desa maupun masyarakat. Diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pendampingan, serta penyediaan media komunikasi yang efektif dan inklusif.

Dengan demikian, pendekatan *interactive planning* berpotensi menjadi solusi strategis dalam mempercepat pencapaian status desa mandiri di Kabupaten Sidoarjo apabila diimplementasikan secara konsisten, inklusif, dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat desa.

F. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan antara lain :

1. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), perlu meningkatkan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada pemahaman perencanaan partisipatif, indikator IDM, dan pengelolaan program berbasis kebutuhan masyarakat.
2. Perlu dilakukan revisi terhadap mekanisme Musdes agar lebih inklusif, akuntabel, dan berbasis data. Forum Musdes sebaiknya tidak hanya menjadi seremonial tahunan, tetapi menjadi media aktualisasi ide dan aspirasi masyarakat secara berkala.
3. Penerapan *interactive planning* harus dikawal dengan indikator evaluatif yang jelas, yang mengukur sejauh mana partisipasi masyarakat telah diwujudkan dalam tahap identifikasi masalah, perumusan tujuan, strategi pelaksanaan, hingga evaluasi.
4. Dibutuhkan sistem pendampingan yang kuat dari pendamping desa atau fasilitator lokal yang memahami konteks sosial budaya setempat dan mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses perencanaan.
5. keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui *interactive planning* harus dipandang sebagai proses jangka panjang yang menuntut komitmen politik, konsistensi kebijakan, dan budaya partisipatif yang terus dibina di semua lini pemerintahan desa.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Kabupaten Sidoarjo. (2022). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021–2026*. Sidoarjo: Bappeda Kabupaten Sidoarjo. Diakses dari <https://bappeda.sidoarjo.kab.go.id/template-1/004/1665978290>
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo. (2022, 9 September). *Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021–2026*. <https://dinpmd.sidoarjo.kab.go.id/template-1/004/1662684646>
- Evinda, A. P., & Adi, S. (2024). *Perencanaan interaktif sebagai perwujudan pembangunan berkelanjutan dalam pengembangan wilayah permukiman di Kabupaten Sidoarjo* (Skripsi). Universitas Airlangga.
- Hermawan, E., Pebriyani, D., Julianty, D. N., Safitri, F., dan Laksono, G. T., 2021. Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1): 191-198.
- Hermawan, Y., & Suryono, Y., 2023. Learning from Goa Pindul: Community empowerment through sustainable tourism villages in Indonesia. *The Qualitative Report*, 28(5): 1365-1383.
- Hidayat, A., & Yani, S. Z. F. (2022). Peran Administrasi Pembangunan Desa. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(7), 7091-7100.
- Istiyanti, D., 2020. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Sukawening. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (PIM)*, 2(1): 53-62.
- Jatim Update. (2023, Maret 6). *Berdasarkan Indeks Desa Membangun, 73 desa di Sidoarjo raih status desa mandiri dari Menteri Desa*. <https://www.jatimupdate.id/berita>